

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS  
PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**HELEN LIMBONG**  
**NIM. 11775201645**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**HELEN LIMBONG**  
**NIM. 11775201645**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : HELEN LIMBONG  
**NIM** : 11775201645  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI  
**TANGGAL UJIAN** : RABU, 22 SEPTEMBER 2021

**DISETUJUI OLEH**  
**Dosen Pembimbing**

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**

**NIK. 130 712 074**

Mengetahui



**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM**

**NIP. 19700826 199903 2 001**

**KETUA JURUSAN**  
**Program Studi Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19781025 200604 100 2**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : HELEN LIMBONG**  
**NIM : 11775201645**  
**JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS  
SOSIAL KOTA DUMAI**  
**TANGGAL UJIAN : RABU, 22 SEPTEMBER 2021**

**DISAHKAN OLEH  
KETUA PENGUJI**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

Mengetahui

**PENGUJI I**

**Afrizal, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19690419 2000701 1 025**

**PENGUJI II**

**Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si**  
**NIK. 130 717 059**



## ABSTRAK

### **ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI**

Oleh :

**HELEN LIMBONG**  
**NIM.11775201645**

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Dumai. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai. Maka disini peneliti tertarik mengambil judul Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai? dan (2) Apa saja hambatan pada Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini, Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Dumai belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan secara keseluruhan belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran dana APBD daerah, terbatasnya pendamping khusus bagi penyandang disabilitas dan perilaku masyarakat penyandang disabilitas yang tidak percaya diri atau minder.*

**Kata kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Kota  
Dumai**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdullillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu **“Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dan berhasil membawa dan menanamkan nilai-nilai kemuliaan bagi segenap umat manusia diseluruh penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. **Kedua Orang Tuaku teristimewa**, Ayahku Wel Limbong dan Ibuku tercinta Ernawaty Nasution (Almarhumah), terimakasih telah banyak melimpahkan perhatian, dukungan, nasehat, bimbingan, dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya, sehingga dengan demikian menjadikan saya tetap tegar dan tabah dalam mengarungi lika-liku kehidupan dan dalam menuntut ilmu.
2. **Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag** sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. **Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. **Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Aamiin.
6. **Bapak Mashuri, M.A.** Selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen pengajar** pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. **Bang Rahman Septian dan Bapak Juliadi** (Aparatur Dinas Sosial Kota Dumai) yang telah memberikan izin serta bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian penulis.
9. **Kak Weilin, Kak Butet, Ibu Maysi, Abah Maysi dan Keluargaku** semua yang telah memberikan support, bantuan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. **Firanissa dan Dwi Ramadhan** yang telah membantu memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu.
11. Sahabat-sahabatku Fitra Rahmatsyah, Maysi Marica, Humul Khairina, Peggy yang memberikan support dan motivasi dalam segala hal dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal C Angkatan tahun 2017 dan semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan serta mendapatkan ridho dari Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dinantikan oleh Rasulullah di telaga Al-Kautsar, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

Helen Limbong  
NIM. 11775201645



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Kebijakan Publik .....	13
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2.1.2 Tujuan Kebijakan .....	15
2.1.3 Faktor-faktor Kegagalan dalam Kebijakan .....	16
2.2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	17
2.3 Penyandang Disabilitas .....	21
2.4 Pandangan Islam tentang Analisis Kebijakan .....	25
2.5 Penelitian Terdahulu .....	27
2.6 Definisi Konsep .....	29
2.7 Konsep Operasional .....	30
2.8 Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB III METODOLIGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber data .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Informan Penelitian .....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	36

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai .....	37
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Dumai .....	37
4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kota Dumai .....	44
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Dumai .....	45
4.2.1 Struktur Organisasi .....	45
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Dumai .....	47
4.2.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Dumai .....	48

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai .....	50
5.1.1 Rehabilitasi Sosial .....	51
5.1.2 Jaminan Sosial .....	59
5.1.3 Pemberdayaan Sosial .....	63
5.1.4 Perlindungan Sosial .....	70
5.2 Hambatan- Hambatan Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai .....	74
5.2.1 Anggaran .....	74
5.2.2 Pendampingan .....	76
5.2.3 Masyarakat Penyandang Disabilitas .....	77
5.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	81
6.2 Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Dumai Tahun 2019-2020 .....	7
Tabel 1.2	Bantuan yang Telah Disalurkan Tahun 2019-2020.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	36
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2019 .....	39
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kota Dumai Menurut Kecamatan (Km <sup>2</sup> ) .....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Dumai .....	47





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrument penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan/kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran daerah atau wilayah yang besar.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan yang lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan dapat terpenuhi khususnya penyandang disabilitas. Tetapi hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata karena mereka mempunyai kekurangan (fisik atau mental).

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.

Hak asasi manusia seperti yang terlampir pada UU No. 39 Tahun 1999 adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal (diakui seluruh orang) sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang membahas ruang lingkup HAM antaranya :

1. Larangan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat terhadap pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan aspek kehidupan lainnya.
2. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan , atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa :

“setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Indonesia sendiri adalah negara yang menganut prinsip persamaan HAM dan kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dan Pasal 28 I pada Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selanjutnya Hak Penyandang Disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* ( Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas ) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.

Dari pernyataan di atas pada dasarnya menentukan beberapa hal yang menjadi hak setiap manusia. Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta masih banyak hak-hak lainnya. Hak-hak tersebut berlaku secara universal artinya berlaku bagi setiap manusia tak terkecuali bagi penyandang cacat yang selanjutnya disebut difabel/disabilitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini adalah pembaharuan dari Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Pemerintah kota Dumai sebagai pelaksana jalannya pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus mengakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berkehidupan masyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk perlindungan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai tersebut pemerintah diwajibkan untuk melakukan perlakuan khusus dan juga melindungi serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas adalah hak yang harus didapatkan dari penyandang disabilitas dimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai No. 1 Tahun 2020 Pasal 67. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial (pemberian alat bantu, sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas), jaminan sosial (asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan), pemberdayaan sosial (pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha) dan perlindungan sosial (bantuan sosial dan bantuan hukum).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah tabel jumlah penyandang disabilitas di Kota Dumai Tahun 2019-2020.

**Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Dumai Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Disabilitas	2019	2020
1.	Disabilitas Rungu	50	56
2.	Disabilitas Wicara	23	56
3.	Disabilitas Daksa	26	25
4.	Disabilitas Mental	30	34
5.	Disabilitas Grahita	20	39
6.	Disabilitas Total Blind	28	46
7.	Disabilitas Autis	15	39
8.	Disabilitas Lambat Belajar	10	17
9.	Disabilitas Eks Kusta	10	9
10.	Disabilitas Low Vision	23	49
11.	Disabilitas Down Syndrom	123	147
<b>Total</b>		<b>358</b>	<b>517</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Dumai 2021

Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas di Kota Dumai mengalami peningkatan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 penyandang disabilitas berjumlah 358 orang dan meningkat pada Tahun 2020 berjumlah 517. Terdapat selisih jumlah penyandang disabilitas sebesar 159 orang.

Dengan semakin meningkatnya penyandang disabilitas di Kota Dumai diharapkan Dinas Sosial Kota Dumai dapat lebih meningkatkan perhatiannya. Dinas Sosial Kota Dumai telah menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas di Kota Dumai.



**Tabel 1.2 Bantuan Yang Telah Disalurkan Tahun 2019-2020**

No	Jenis Bantuan Yang Disalurkan	2019	2020
1.	KPD	203	365
2.	Tongkat Netra	41	30
3.	Walker	17	16
4.	Alat Bantu Dengar	10	44
5.	Kruk	8	14
6.	Kebutuhan Dasar	25	184
7.	Kursi Roda Kusus	30	33
8.	Kursi Roda Dewasa	11	15
9.	Kursi Roda Anak	2	24
10.	UEP	23	88
11.	Kacamata	7	26
<b>Total</b>		<b>377</b>	<b>839</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2021*

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat jumlah kebutuhan bantuan mengalami peningkatan di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 bantuan yang disalurkan berjumlah 377 dan meningkat pada Tahun 2020 berjumlah 839. Terdapat selisih jumlah bantuan yang disalurkan sebesar 462.

Namun pada kenyataannya dalam penyaluran bantuan untuk penyandang disabilitas masih terdapat beberapa kendala serta realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masalah pemberian alat bantu, pendidikan dan kesejahteraan. Pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas, isu disabilitas sangat jarang untuk menjadi pembahasan di setiap lini kehidupan, penyandang disabilitas hanya dipandang melalui sudut pandang proyek bantuan dan pemberian jaminan bukan pada pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain. Penyandang disabilitas masih ditempatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai masyarakat kelas dua dimana hak-haknya seringkali diabaikan begitu saja. Namun, pentingnya pandangan masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat berubah seiring adanya perubahan paradigma dalam pengistilahan penyandang disabilitas tersebut

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa kuota bantuan yang disediakan Dinas Sosial lebih sedikit dibanding jumlah disabilitas yang membutuhkan. Fenomena ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Dumai masih perlu di tingkatkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Dumai dengan judul **“Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai”**.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai?
2. Apa saja hambatan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Dumai dalam Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut.

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai dan hambatan- hambatan yang dihadapi.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Dumai dan di kediaman penerima manfaat.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mengungkapkan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah di peroleh.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan serta rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Istilah *policy* berasal dari bahasa Latin *politea* yang berarti kewarganegaraan. Karena *policy* dikaitkan dengan pemerintah, maka akan lebih sesuai jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan.

Sehubungan dengan kebijakan, Anderson dalam Agustino (2012:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini, menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang dimaksud/diusulkan. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Dye dalam Agustino (2012:8) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Lain dari itu, Richard Rose dalam Agustino (2012:7) juga berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”. Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Definisi lain mengenai kebijakan menurut Carl Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus kebijakan publik adalah bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton dalam Agustino (2012:8) sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat dan sebagainya.

Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas di sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

#### 2.1.2 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

- 1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilitator)
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai Koordinator)
- 4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor)

### 2.1.3 Faktor-faktor Kegagalan Dalam Kebijakan

Sebuah kebijakan/program dapat gagal memperoleh dampak yang diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan *output* sebagai mana yang dituntut oleh program tersebut, namun gagal mencapai *outcomenya* apalagi jika keduanya gagal untuk didapatkan. Menurut Anderson, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor berikut :

1. Sumber daya yang tidak memadai.
2. Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif, seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan).
3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor.
4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya karena takut dianggap melanggar prosedur, *implementers* bertindak sesuai dengan *textbook* walaupun situasinya mungkin berbeda).
5. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding bahkan beretntangan satu sama lain misalnya kebijakan untuk menumbuhkan industri dalam negeri yang memberikan insentif pajak dan kemudahan modal, disisi lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energi.
6. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan.
8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan.
9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

## **2.2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

Pada Bagian Kelima Pasal 67 dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan hak atau kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi :

### **a. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas maupun melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi juga berfungsi untuk mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

1. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas.
3. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas.

Maksud dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas agar lebih tegar dalam kondisinya dan dapat mempelajari keterampilan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya, bukan hanya itu saja dengan rehabilitasi penyandang disabilitas diberikan bimbingan dan pemahaman sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan hubungan komunikasi dan berbaaur dengan masyarakat awam lain.

#### b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Tujuannya agar seluruh kebutuhan dasar hidup rakyatnya dalam hal kesehatan dan perlindungan kesejahteraan untuk penyandang disabilitas dapat tercapai.

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diberikan dalam bentuk :

1. Asuransi Kesejahteraan Sosial

Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

2. Bantuan Langsung Berkelanjutan

Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan ini diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai.

#### c. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang sosial mengkoordinasikan memfasilitasi dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dalam bentuk :

##### 1. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi ini penting untuk penyandang disabilitas agar mereka merasa didukung serta diperhatikan dimana motivasi ini bisa berpengaruh dalam semangat mereka sendiri. Pemberian motivasi ini bisa dilakukan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan terdekat untuk penyandang disabilitas. Tujuan pemberian motivasi adalah untuk lebih giat dan lebih semangat lagi. Tetapi, motivasi seseorang dipengaruhi oleh kekuatan didalam diri seseorang penyandang disabilitas itu sendiri.

##### 2. Pelatihan Keterampilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelatihan keterampilan atau bimbingan ini tujuannya dimana untuk meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas agar semakin percaya diri dan diharapkan dapat mandiri dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

3. Pendampingan

Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan lebih baik dan layak.

4. Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha

Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha adalah bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang ingin membuka usaha dimana Dinas Sosial memberikan modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

d. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

1. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2. Bantuan hukum

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan dari penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dan pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### 2.3 Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya sedangkan yang dimaksud pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie (2012), bahwa secara etimologi adalah konsep-konsep Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan penyandang disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata penyandang disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan.

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya tanpa memandang kekurangan yang diderita oleh penyandang disabilitas, oleh karena itu maka pemerintah membuat pengaturan hukum mengenai perlindungan atas hak penyandang disabilitas tersebut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU PD).

Pemerintah kota Dumai menerapkan peraturan daerah Kota Dumai mengenai Penyandang Disabilitas yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dimana prinsipnya meliputi :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang.
- b. Nondiskriminasi.
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat.
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan.
- e. Kesetaraan kesempatan.
- f. Aksesibilitas.
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Disabilitas diklasifikasikan menjadi beberapa pengelompokkan antara lain sebagai berikut :

a. Disabilitas fisik, terdiri dari :

- 1) Disabilitas tubuh yaitu, anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan seperti amputasi pada anggota tubuh tangan, kaki, paraplegia, kecacatan tulang, dan cereblaypalsy.
- 2) Disabilitas rungu/wicara yaitu kecacatan sebagai akibat hilangnya atau tergantungnya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Disabilitas rungu wicara terdiri dari disabilitas rungu dan wicara, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.
- 3) Disabilitas netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Disabilitas netra

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari buta total, persepsi cahaya dan memiliki sisa penglihatan (low vision). Buta total yaitu tidak dapat melihat sama sekali objek didepannya (hilangnya fungsi penglihatan). Persepsi cahaya yaitu seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya. Memiliki sisa penglihatan (low vision) yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

b. Disabilitas Mental, terdiri dari :

- 1) Disabilitas mental retardasi yaitu seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya.
- 2) Eks psikotik yaitu seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

c. Disabilitas fisik dan mental (cacat ganda) yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya. Kedepannya agar fasilitas layannya lebih ramah terhadap kondisi fisik dua variabel (tunanetra dan tunadaksa) tersebut. Berikut merupakan deskripsi dari kedua variabel :

a. Penyandang Tunanetra

Penglihatan seseorang memiliki peranan penting dalam mendapatkan informasi dari lingkungan. Apabila penglihatan seseorang hilang maka saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungan akan hilang. Hal ini berakibat adanya hambatan dalam memperoleh pengalaman baru yang beraneka ragam. Dengan hilangnya penglihatan, seorang tunanetra dalam memperoleh informasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantungkan pada indra yang lain dan masih berfungsi. Indra pendengaran, peraba, penciuman, pengecep. Pengalaman kinestetis yang dimiliki adalah saluran keindraan yang cukup penting, akan tetapi indra di luar penglihatan ini sering tidak dapat mengidentifikasi dan memahami sesuatu objek diluar jangkauan fisiknya secara mendetail. Dengan kata lain objek yang berada di luar jangkauannya secara fisik tidak akan berarti bagi tunanetra.

#### b. Penyandang Tunadaksa

Penyandang tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan persendian baik struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak/normal. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem oto, tulang dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan.

### 2.4 Pandangan Islam tentang Analisis Kebijakan

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang dibutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebijakan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan mendesak.

Selain itu, hal yang berkaitan dengan tugas pemimpin dan Negara untuk mensejahterakan hidup masyarakatnya juga terkandung dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah : 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-baqarah ayat 177)*

Negara sebagai wadah masyarakat dengan ruang lingkup besar dalam Al-Qur'an diwajibkan bagi pemimpin dan pemerintah untuk senantiasa



mensejahterakan seluruh rakyatnya, dengan membuat kebijakan yang menaikkan tingkat ekonomi masyarakat rendah, dan melakukan perlindungan khusus kepada masyarakat yang terlantar, penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

Berdasarkan surah Al-Baqarah : 177 tersebut, dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong sesama muslim. Tolong menolong tersebut dijelaskan dengan cara infaq, sedekah, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meringankan saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. pemerintah juga bertanggung jawab memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, membuat Badan Amil Zakat sebagai wadah dari adanya infaq atau sedekah untuk meringankan mereka yang kurang beruntung tersebut.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang masih dijadikan acuan dalam penelitian yaitu :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Jenraffles Antonius Sinaga	Pengaturan Perlindungan Hak Disabilitas Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia	Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan secara hukum normatif	Dalam pengaturan konvensi CRPD mengenai penyandang disabilitas sudah sangat jelas dan memberikan kewajiban kepada negara untuk mematuhi konvensi CRPD yang telah disetujui bersama oleh beberapa negara dan untuk pengaturan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia sudah sangat jelas dan dapat dipahami akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				<p>masih belum melindungi hak bagi penyandang disabilitas dan masih menganggap penyandang disabilitas tidak seperti kalangan ormal lainnya sehingga perlu ditingkatkan untuk memperhatikan hak bagi penyandang disabilitas.</p>
2.	Ismail Shaleh	Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris	<p>Yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang belum berjalan, selain itu ketiadaan peraturan daerah yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang diatur secara nasional.</p>
3.	Frichy Ndaumnu	Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang akan mengungkap secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian	<p>Bahwa upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten TTS masih belum berjalan secara maksimal. Belum ada upaya intervensi program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 kepada penyandang disabilitas yang bersifat tetap dan berkelanjutan.</p>

**Tabel 2.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Helen Limbong (2021)	Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Dumai	Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Dumai dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini adalah kurangnya anggaran dan kurangnya pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini di sesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Periode penelitian pada tahun terbaru.

## 2.6 Definisi Konsep

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada pada teori-teori yang berhubungan dengan fokus dan lokus penelitian, sebagai dasar dan pedoman untuk mengatur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalasi atas jumlah karakteristik kejadian, kelompok, atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk

menghindari salah pengertian, amka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
- b. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah politik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas demi kepentingan publik
- c. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program
- d. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya sedangkan yang dimaksud pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.

## **2.7 Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.



## Operasional Konsep

Konsep/Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020	1. Rehabilitasi Sosial	a. Pemberian Alat Bantu b. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas
	2. Jaminan Sosial	a. Asuransi Kesejahteraan Sosial b. Bantuan Langsung Berkelanjutan
	3. Pemberdayaan Sosial	a. Pemberian Motivasi b. Pelatihan Keterampilan c. Pendampingan d. Pemberian Modal, Peralatan Usaha, fasilitas tempat usaha
	4. Perlindungan Sosial	a. Bantuan Sosial b. Bantuan Hukum

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Berfikir

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai

Analisis Kebijakan

1. Rehabilitasi Sosial
2. Jaminan Sosial
3. Pemberdayaan Sosial
4. Perlindungan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan (Sugiyono, 2011).

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Dumai, yang beralamatkan di Jalan S. Moh. Amin, Jaya Mukti, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28826. Alasan memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Dumai adalah dikarenakan penelitian dilakukan untuk menganalisa Analisis Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan waktu penelitian ini selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

##### 3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman suara dan gambar.

##### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan peneliti. (Khodijah, 2019)

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. (Sandu siyoto, 2015 ). Disini peneliti memperoleh sumber data sekunder yang berasal dari situs-situs resmi pemerintahan Kota Dumai.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

#### **a. Observasi**

Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi (2010:70) dalam (Satria, 2017 ) Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti



melakukan observasi di lapangan langsung agar mengetahui kondisi di lapangan dan mendapat gambaran tentang tempat penelitian yang akan dilakukan.

#### **b. Wawancara**

Menurut Drs. Cholid Narbuk dan Drs. H. Abu Achmadi (2010: 83) dalam (Satria, 2017 ) Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara sebagai penanya dan yang di wawancarai memberikan keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

#### **c. Dokumentasi**

Menurut Imam Gunawan dalam (Satria, 2017 ) Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

### **3.5 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan seseorang yang dalam penelitian yang menjadi narasumber untuk memberikan data. Dalam penelitian ini peneliti memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 85) bahwa, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kassubag Program dan Data	1
2	Seksi Rehabilitasi Sosial	1
3	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1
4	Penyandang Disabilitas	3
<b>Total</b>		<b>6</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

### 3.6 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono dalam (Anastria, 2018 ) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Dumai

Pada tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum *romusha* (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi Dumai. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km<sup>2</sup>.

Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

- a. Tahun 1945 – 1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
- b. Tahun 1959 – 1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
- c. Tahun 1963 – 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Filosofis dasar atas peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kotamadya, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1. Penduduk

Penduduk Kota Dumai Tahun 2010, berjumlah 253.803 jiwa yang terdiri atas 131.465 jiwa laki-laki dan 305.338 jiwa perempuan. Dengan Kepadatan Penduduk 178.00 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk berkisar 3,51 persen/tahun. Menurut data tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, Jawa, Bugis, dan Tionghoa adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 156 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Populasi
1.	2017	297.638 jiwa
2.	2018	303.292 jiwa
3.	2019	308.812 jiwa

*Sumber Data : Dumai dalam angka Tahun 2020*

## 2. Pendidikan

Untuk ukuran sebuah kota, di Kota Dumai sekolah sebagai sarana pendidikan pembelajaran sangat lengkap. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak atau Raudatul Athfal hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau Madrasah Aliyah. Baik itu yang merupakan sekolah negeri juga beberapa yang dikelola oleh yayasan swasta viz prayoga seperti sekolah dasar dan menengah Santo Tarcisius. Beberapa sekolah milik Pertamina mulai dari SD, SMP dan SMA YKPP merupakan salah satu sekolah swasta favorite di kota Dumai. Dan semua sekolah di Dumai sudah menerapkan sistem standar nasional. Sehingga sekolah yang ada di Dumai sangat berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi, Tidak sebatas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah menengah, beberapa perguruan tinggi juga sudah berdiri sejak Dumai masih berstatus kota administratif. Dan seiring pembangunan yang sangat pesat, beberapa sekolah tinggi tersebut telah meningkatkan kualitasnya, dan mampu bersaing dengan sekolah tinggi yang berasal dari daerah lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Dumai, Akademi Manajemen Ilmu Komputer Dumai, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung, Akademi Kebidanan Hang Jebat dan Akademi Akuntansi Riau.

### 3. Perekonomian

Indikator ekonomi makro berupa Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai yang terus meningkat tiap tahunnya sejak tahun 2000-2005 merupakan gambaran keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Dumai. Untuk mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut maka titik berat pembangunan ekonomi Kota Dumai adalah dengan mempertahankan dominasi pembangunan pada sektor industri, penjualan, pembangunan angkutan serta bangunan disamping memperhatikan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Dumai sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kendala yang dihadapi selain masalah modal adalah Status lahannya masih disebut pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Empat kecamatan di Kota Dumai yaitu

Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit kapur dan Dumai Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya lahan yang potensial untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan agrobisnis dan agroindustri dengan rekayasa teknologi tepat guna *byocyclo farming* (sistem pertanian yang memadukan unsur tanaman, ternak, perikanan dan yang diatur sedemikian rupa sehingga bersinergi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi proses daur ulang alami secara biologis) seperti padi, palawija, sayuran, pisang, nenas, durian, mangga, rambutan, sawit, aneka ternak (sapi, kambing, itik dan ayam) serta budidaya tambak ikan air tawar (patin, ikan mas, gurami serta ikan hias). yang lebih banyak yang di hasilkan dari kecamatan sungai sembilan untuk ke depan adalah sawit, pisang, dan palawija. Saat ini daerah kecamatan sungai sembilan khususnya kelurahan basilam baru sangat kekurangan sarana infra struktur untuk pembangunan jalan. Terutama pembangunan jalan utama simpang kaplingan hingga Pangkalan durian.

Kawasan Dumai sangat strategis untuk dijadikan kawasan pengembangan perdagangan internasional, karena Dumai berada di kawasan lintas perdagangan internasional Selat Melaka. Sejak beberapa tahun Kotamadya Dumai telah mengajukan usulan sebagai kawasan perdagangan bebas/*Free Trade Zone*. Pemerintah RI sedang menyempurnakan produk hukum yang disebut Undang-Undang kawasan FTZ (free trade zone).

Dumai, juga dikenal sebagai kota minyak. Tiga industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI (dahulu Caltex Pacific Indonesia sekarang Chevron Pacific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri serta disusul oleh industri pengolahan minyak sawit (CPO) PT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BKR (Bukit Kapur Reksa). Selain Industri Skala besar seperti di atas, terdapat juga beberapa industri kecil atau home Industri. Pengolahan hasil pertanian seperti Kelapa dijadikan VCO minyak kelapa murni.

Kota Dumai dalam memainkan peranannya ke depan telah memiliki lima kawasan Industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Dumai (KID) di Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri di Bukit Timah. Salah satu kawasan inidustri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni kawasan industri Pelintung. Di kawasan industri ini telah dibangun satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar. Telah dibangun juga pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi yang diyakini menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan terakhir dari kota dumai adalah beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan turunannya sudah membangun pabrik di kota Dumai, tepatnya di Lubuk Gaung seperti PT. Sari Dumai Sejati (Asian Agri), PT. Ivo Mas Tunggal (Sinarmas), PT. Energi Sejahtera Mas(anak perusahaan Sinarmas Cepsa Pte.Ltd.) dan PT Energi Unggul Persada.

#### 4. Transportasi

Dumai memiliki Bandar Udara Pinang Kampai yang terletak berdekatan dengan Kompleks Perumahan PT. CPI. Disamping akses udara, Kota Dumai memiliki keunggulan sebagai salah satu kota di Provinsi Riau yang berpeluang untuk memanfaatkan potensi pengembangan pelabuhan laut, dimana Dumai berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka yang dikelola



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh PELINDO dan beberapa pelabuhan rakyat. Pelabuhan sri junjungan di Dumai telah dibangun sebagai pelabuhan penghubung untuk kegiatan ekspor impor, begitu juga para penumpang yang ingin menuju ke Malaka – Malaysia. Pelabuhan Dumai terdiri dari 15 unit, 4 unit dimiliki Chevron, 6 unit dimiliki PT. Pertamina (Persero) dan 5 unit milik pemerintah. Sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari. Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor minyak Indonesia. Pada saat ini aktivitas ekspor gas sejumlah USD 426.123 juta pertahun.

#### 5. Budaya dan Pariwisata

Kota Dumai mempunyai keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu, pengaruh budaya dari provinsi tetangga juga sangat terasa, seperti budaya Minangkabau (Sumatra Barat) karena di kota Dumai sendiri suku Minangkabau sangat dominan. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah. Kota Dumai yang terletak di tepi pantai memiliki potensi pengembangan pariwisata seperti wisata alam, Budaya dan belanja. Beberapa daerah wisata di antaranya kawasan konservasi di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, kawasan pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dan Tasik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur. Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka.

#### 4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madya. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 april 1999 tercantum pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan kota madya DATI II Dumai, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administrasi di dalam kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa. Data pada tahun 2019 kota Dumai terdiri dari 7 kecamatan, 33 kelurahan, dengan jumlah penduduk 308,812 jiwa dan total luas 1.772,38/km<sup>2</sup>. Terdapat suku melayu (29,90%), batak (11%), jawa (9,52%), minangkabau (9,51%), bugis (7,52%), tionghoa (3,75%), dan lain-lain (23,8%). Kota Dumai dengan mayoritas agama islam (84,74%), kristen (11,26%), protestan (10,43%), katolik (0,83%), budha (3,22%), Konghucu (0.19%), hindu (0.01%).<sup>16</sup> Kota Dumai memiliki rata-rata ketinggian adalah 3 meter diatas permukaan air laut, wilayah kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 celcius dengan kondisi tanah rawa bergambut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah dibagian utara dan disebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi, kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0-0,5 meter, struktur tanah umumnya terdiri dari tanah pedsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai diwilayah Dumai, sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke hulu sungai.

**Tabel 4.2 Luas Wilayah Kota Dumai Menurut Kecamatan (Km<sup>2</sup>)**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Bukit Kapur	200,00
2.	Medang Kampai	373,00
3.	Sungai Sembilan	975,38
4.	Dumai Barat	44,98
5.	Dumai Selatan	73,50
6.	Dumai Timur	47,52
7.	Dumai Kota	13,00
<b>Total</b>		<b>1.727,38</b>

Sumber Data : Badan Statistik Kota Dumai

## 4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Dumai

### 4.2.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di bidang Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subbagian Program dan Data
2. Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Penanganan dan Rehabilitasi, terdiri dari:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial
  2. Seksi Penanganan Bencana Alam dan Sosial
  3. Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial
  2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
  3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- e. UPT
- f. Jabatan Fungsional.



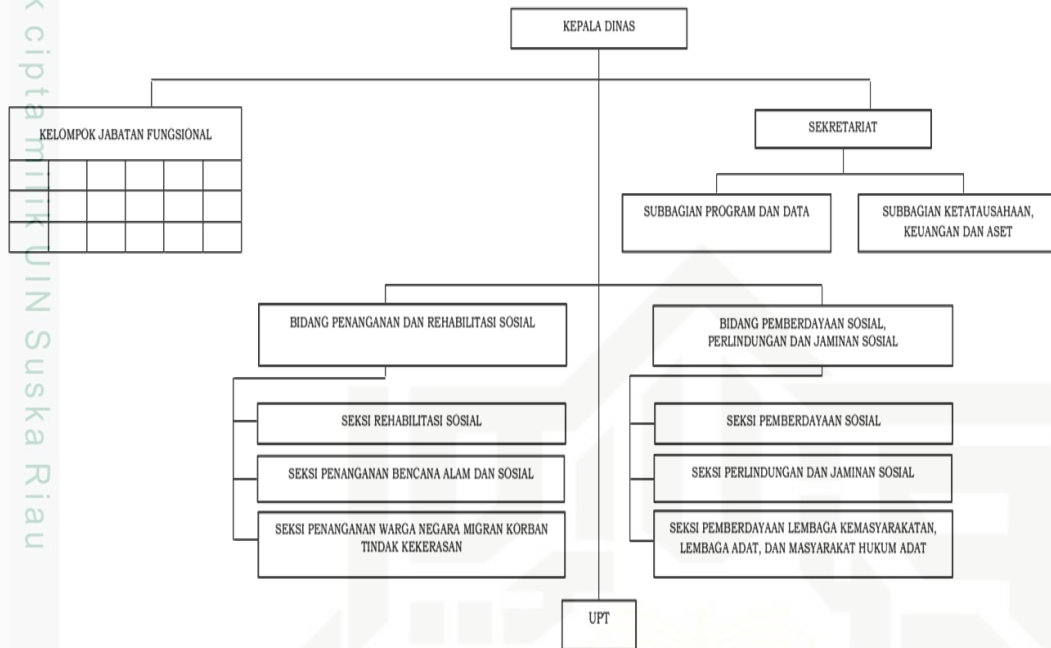
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA DUMAI



#### 4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Dumai

##### 1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang sosial;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan/peraturan sebagai kebijakan teknis bidang sosial;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial serta bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial;
- g. Penyiapan gungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### **4.2.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Dumai**

1. Visi

Visi dari Dinas Sosial Kota Dumai adalah “Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat melembaganya semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta pemantapan aparatur.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Dumai agar tercapainya visi tersebut. Misi adalah Penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Maka Misi Dinas Sosial Kota Dumai sebagai adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
4. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, perencanaan serta kerjasama program bidang sosial.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan dibuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Dinas Sosial Kota Dumai :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Dumai dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pemberian alat bantu secara merata terhadap penyandang yang tidak mampu, masih banyaknya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik serta kurang nya bantuan sosial yang lain sehingga kurang terpenuhi nya kebutuhan dari penyandang disabilitas.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Dumai dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas antara lain kurangnya anggaran APBD daerah yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas, Kurangnya Pendampingan khusus untuk penyandang disabilitas, tidak berjalannya secara maksimal program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Dumai dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sesuai dengan Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam mengimplementasikan kebijakan Negara ada beberapa syarat yang harus didapat oleh pihak Instansi, untuk itu hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwasanya Dinas Sosial Kota Dumai selaku pelaksana dari kebijakan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai belum dilaksanakan secara maksimal.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menarik beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat agar dapat kiranya memberikan dana insentif kepada daerah yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan dapat membantu anggaran daerah yang belum dapat memenuhi anggaran bagi penyandang disabilitas. Untuk Pemerintah Pusat agar dapat memberikan sosialisasi atau pengetahuan pada seluruh Dinas Sosial yang ada di Indonesia khususnya pada Dinas Sosial Kota Dumai terkait bagaimana upaya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas karena dengan adanya sosialisasi tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan pegawai Dinas Sosial dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Dumai.
2. Untuk Pemerintah Kota Dumai agar dapat kiranya lebih memberi perhatian khusus bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai sesuai dengan aturan perda yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Untuk Dinas Sosial Kota Dumai agar bergerak aktif dan melaksanakan program yang telah dibuat secara serius guna melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Kota Dumai agar terciptanya persamaan hak asasi manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Purnomo Setiadi dan Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Edi, Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementasi Kebijakan Publik*. Congresinal: Quartely Press.
- Dedy Kustawan dan Budi Hermawan. 2013. *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*. Jakarta Timur: Luxima.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 20. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Meter dan Van Horn dalam Wahab. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*: Arena Kami.
- Winarni, Endang Widi. 2018. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Al-Qur'an :**

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 177

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 28 I

Undang-undang Nomor 2016 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

**Jurnal :**

Ndaumanu, Frichy. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.*

Mukrimah, Harum. 2018. *Implementasi Hak Aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang.*

Antonius Sinaga, Jenrafles . 2020. *Pengaturan Perlindungan Hak Disabilitas Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia.*

Shaleh, Ismail. 2018. *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang.*

**Website :**

<http://www.dumaikota.go.id/> diakses pada tanggal 7 Februari 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI

#### 1. Rehabilitasi Sosial

##### 1.1 Pemberian alat bantu

- Pemberian alat bantu itu biasanya berapa lama rentang waktu dalam setahun atau bagaimana sistemnya ?
- Apakah pemberian alat bantu sudah merata keseluruh disabilitas yang berada dibawah naungan dinas sosial ? kalau belum kenapa ?
- Apa kendala atau hambatan dalam pemberian alat bantu ?

##### 1.2 Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas

- Apa upaya yang dilakukan dinas sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ?
- Jelaskan bentuk sosialisasi yang dilakukan beserta contohnya
- Saat ini bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang disabilitas ?

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas**

- a. Siapakah yang menmapung keluhan dari penyandang disabilitas ? apakah ada tim khusus untuk konsultasi pengembangan kemampuan sosialisasi bagi penyandang disabilitas ?
- b. Dalam bentuk apakah konsultasi tersebut, apa secara langsung atau via telepon
- c. Apakah konsultasi ini diberikan secara gratis atau keluarga penyandang disabilitas perlu membayar biaya konsultasi ?

## **2. Jaminan Sosial**

### **2.1 Asuransi Kesejahteraan Sosial**

- a. Bagaimana pemberian asuransi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas ?

### **2.2 Bantuan Langsung Berkelanjutan**

- a. Bagaimana dan berupa apa bantuan langsung berkelanjutan ini di lakukan?

## **3. Pemberdayaan Sosial**

### **3.1 Pemberian Motivasi**

- a. Bagaimana pemberian motivasi dilakukan ?
- b. Seberapa besar dampak pemberian motivasi ini kepada penyandang disabilitas ?

### **3.2 Pelatihan Keterampilan**

- a. Pelatihan dalam bentuk apa yang diberikan?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa manfaat untuk kedepannya bagi penyandang disabilitas melakukan pelatihan tersebut?

### 3.3 Pendampingan

- a. Adakah pendampingan yang dilakukan pemerintah kepada penyandang disabilitas? dalam bentuk apa pendampingan tersebut diberikan?

### 3.4 Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha

- a. Adakah bantuan kepada penyandang disabilitas seperti bantuan modal usaha dan tempat usaha? Bagaimana sistem pemberian bantuan tersebut, adakah kriteria tertentu?

## 4. Perlindungan Sosial

### 4.1 Bantuan Sosial

- a. Apakah bantuan sosial yang sudah dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik? adakah hambatan dalam melakukannya?

### 4.2 Bantuan Hukum

- a. Adakah pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas jika tersangkut urusan hukum?

## 5. Hambatan

1. faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan (internal dan eksternal)
2. apakah sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang dibuat





### Daftar Pertanyaan Penyandang Disabilitas

1. Adakah bantuan yang datang dari pemerintah ?
2. Menurut anda, sudah cukupkah bantuan dari pemerintah tersebut?
3. Menurut anda, apakah pemerintah saat ini sudah cukup memperhatikan penyandang disabilitas?
4. Apa harapan anda kepada pemerintah?
5. Apakah ada jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas?
6. Apakah ada pelatihan keterampilan yang disediakan dari pihak Dinas Sosial untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki ?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini ?
8. Apakah ada bantuan pemberian alat bantu dari pihak Dinas Sosial ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KOTA DUMAI



Wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Dumai (Tanggal 26 Juli 2021)



Wawancara dengan Kassubag Bidang Program dan Data Dinas Sosial Kota Dumai (Tanggal 26 Juli 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Operator Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Dumai  
(Tanggal 2 Agustus 2021)



## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA YANG DILAKUKAN PADA MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan penyandang Disabilitas Tuna daksa



Wawancara dengan saudara dari penyandang disabilitas Tuna Grahita



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan penyandang disabilitas Tuna Netra





UIN SUSKA RIAU

Hak dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3303/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Juli 2021 M  
28 Zulqaidah 1442 H

Kepada  
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos., M.Si.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Helen Limbong  
NIM : 11775201645  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Dumai"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3306/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 Juli 2021 M

28 Zulqaidah 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Helen Limbong  
NIM. : 11775201645  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun  
2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di  
Kota Dumai" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan  
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM  
NIP. 19700826 199903 2 001





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42535  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.VII/PP.00.9/3306/2021** Tanggal **8 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

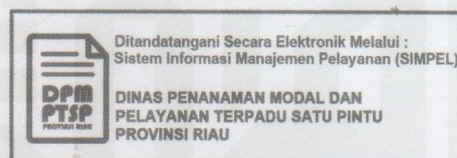
- |                      |   |                                                                                                                                                          |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>HELEN LIMBONG</b>                                                                                                                                     |
| 2. NIM / KTP         | : | 11775201645                                                                                                                                              |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA                                                                                                                                 |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                       |
| 5. Alamat            | : | JL. SEJAHTERA, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR, KOTA DUMAI                                                                                           |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL KOTA DUMAI                                                                                                                                  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Juli 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA DUMAI

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

DUMAI - RIAU

### REKOMENDASI

Nomor : 071/VII/2021/249

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/42535 tanggal 13 Juli 2021 perihal rekomendasi penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : **HELEN LIMBONG**  
 Nomor Mahasiswa : 11775201645  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Jenjang : S.1  
 Alamat : Jln. Sejahtera, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Dumai - Riau  
 HP. 0822-8306-5848

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Sosial Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI) "**.

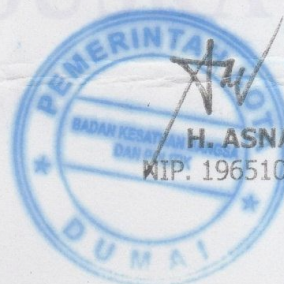
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Oktober 2021.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai  
 Pada 15 Juli 2021

Plt KEPALA,



**H. ASNAM, ST. M.Si**  
 NIP. 19651012 199903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Dumai.
2. Dinas Sosial Kota Dumai
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS SOSIAL

Jl. Sultan Muhammad Amin No. 39 Telp. (0765) 31592  
DUMAI - RIAU

## SURAT KETERANGAN Nomor :400/ 631 /Dinsos

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRILAGAN, SH, M, Si  
NIP : 19720412 200112 1 003  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Sosial Kota Dumai

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HELEN LIMBONG  
No. Mahasiswa : 11775201645  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Asal Institusi : UIN Suska Riau Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Kantor Dinas Sosial Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI"

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Dumai

Pada Tanggal Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial



AFRILAGAN, SH, M, Si

Pembina  
NIP. 19720412 200112 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hakcipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Helen Limbong** adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 11 September 1999 di Kota Dumai, penulis merupakan anak 1 dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Wel Limbong dan Ibu yang bernama Ernawaty Nasution. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 022 Jaya Mukti pada Tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Budi Dharma Dumai selesai pada Tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YKPP Dumai selesai pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis diterima melalui jalur SBMPTN.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Walikota Dumai tepatnya pada Bagian Perekonomian. Dan juga penulis telah mengabdikan diri di masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Buluh Kasap.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Dumai”** penelitian dilakukan pada Dinas Sosial Kota Dumai. Dimana pada Tanggal 22 April 2021 penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal dan pada Tanggal 22 September 2021 penulis mengikuti Ujian *Oral Comprehensive* di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan LULUS dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

